

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN JULI DI OPD Plt. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 6 Agustus 2026

B. Pimpinan Rakor

Plt. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Plt. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 59,53 %

b. Keuangan = 11.929.897.171 (56,29%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.020.000			8.220.000		
1	Verifikasi Manajemen Risiko (MR)/Fasilitasi Pansus LKPJ Gubernur/FGD Urusan PPPA Dalduk KB	12.020.000	100	68,39	8.220.000	(31,61)	penyerapan anggaran menyesuaikan kebutuhan
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		53.760.000			8.538.500		
1	Rakor Data PPPA dan Dalduk KB/Rakor Data Pilah Perempuan dan Anak Jawa Tengah	53.760.000	46,59	18	8.538.500	(28,59)	rakor belum dilaksanakan menunggu pelaksanaan rakor di kementerian
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		15.000.000			1.320.000		
1	Rakor Data Kekerasan Perempuan dan Anak Jawa Tengah	9.050.000	37,63	0	0	(37,63)	Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Pilah ditunda karena menyesuaikan Rakor

							terkait data di Kemenpppa
2	Fasilitasi Pansus LKPJ Gubernur/Fasilitasi Rapat Data Kekerasan Perempuan dan Anak Jawa Tengah/FGD Urusan PPPA Daiduk KB	5.950.000	52,94	22,18	1.320.000	(30,76)	Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Pilah ditunda karena menyesuaikan Rakor terkait data di Kemenpppa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.457.489.000			6.541.303.373		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.457.489.000	63	60	6.541.303.373	(3)	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.380.000			4.412.000		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.380.000	46,81	25	4.412.000	(21,81)	Menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	71.068.000			4.748.000		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	71.068.000	8,65	8	4.748.000	(0,65)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000			27.530.000		
1	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	60.000.000	55,33	49,16	27.530.000	(6,17)	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.862.000			8.472.400		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	38.862.000	54,68	24	8.472.400	(30,68)	Meyesuaikan kebutuhan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.982.000			1.506.000		
1	Fasilitasi Kegiatan	2.982.000	88	50,50	1.506.000	(37,50)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.750.000			0		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.750.000	42,12	16,66	0	(25,46)	Karena hari Jumat sebagian besar pegawai WFH maka tidak ada senam sehingga anggaran instruktur senam tidak terserap
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.728.000			10.125.000		
1	Pembayaran Pajak dan/atau ganti plat kendaraan dinas	25.728.000	72,38	70	10.125.000	(2,38)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	11.525.000			2.750.000		
1	Peningkatan Kapasitas Tim Teknis PUG Kabupaten Kota	11.525.000	100	23,86	2.750.000	(76,14)	Penyelenggaraan menunggu jadwal

							verifikasi lapangan PPE KemenPPPA
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		53.200.000			2.750.000		
1	Pemantauan dan Evaluasi PUG	40.800.000	52,36	19,94	2.750.000	(32,42)	Penyesuaian jadwal narasumber/fasilitator dan OPD
2	Piloting Implementasi PUG	12.400.000	25	10	0	(15)	Penyesuaian jadwal narasumber/fasilitator dan OPD terkait
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi		27.005.000			16.650.000		
1	Penyusunan RAD PUG Provinsi	27.005.000	100	64	16.650.000	(36)	penyusunan Draft RAD PUG masih menunggu jadwal dari Bappeda
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi							
sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi		687.938.000			280.801.000		
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	294.570.000	58,07	50,89	149.896.500	(7,18)	Menyesuaikan jadwal DRPD Provinsi Jawa Tengah
2	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Perempuan	393.368.000	47,45	36,71	130.904.500	(10,74)	Kegiatan Perempuan Aman belum terlaksana mengingat jadwal kegiatan yang berubah
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi		45.046.000			6.210.000		
1	Peningkatan Kapasitas dan Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten/Kota	45.046.000	23,20	14,78	6.210.000	(8,42)	perjadin menyesuaikan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		18.650.000			0		
1	Fasilitasi Peningkatan Tim Ketahanan Keluarga Provinsi dan Kabupaten/Kota	18.650.000	33	0	0	(33)	masih menyusun konsep kegiatan TPK2D Provinsi yang melibatkan anggota TPK2D dari OPD-OPD terkait
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak		30.956.000			1.833.000		
1	Edukasi Pemenuhan Hak Anak melalui Peran Bunda Forum	30.956.000	25,80	6	1.833.000	(19,80)	menyesuaikan jadwal wagub

	Anak Jawa Tengah (Dolan Bareng Bunda Forum Anak)						
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi		19.220.000			12.972.000		
1	Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan hidup bagi AMPK	19.220.000	100	70	12.972.000	(30)	kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai RKO
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi		22.000.000			0		
1	Pelaksanaan Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan ABH dan perkawinan anak	22.000.000	50	0	0	(50)	kegiatan dilaksanakan untuk mendukung Hari Anak Nasional tingkat Provinsi yang semula akan dilaksanakan tgl 23 Juli 2026 diundur pada bulan Agustus 2026
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi		8.720.000			0		
1	Pelaksanaan FGD Penguatan kerjasama lintas sektor dalam perlindungan anak	8.720.000	33	0	0	(33)	pelaksanaan kegiatan di bulan Oktober. salah input target fisik di RKO
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		13.667.000			1.733.000		
1	Pelaksanaan Advokasi PANDU CINTA (Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak)	13.667.000	68,73	12,68	1.733.000	(56,05)	Menunggu kesiapan materi PANDU CINTA yang berkolaborasi dengan TP PKK Provinsi Jawa Tengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		29.621.000			14.309.000		
1	Peningkatan Kapasitas bagi Kader BKB, BKR, BKL dalam Upaya Penurunan Angka Stunting	29.621.000	61,49	48,43	14.309.000	(13,06)	Biaya perjadin sampai Juli belum terealisasi semua karena RKO menyesuaikan kebutuhan anggaran di SIPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			3.000.000		
1	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan	10.000.000	40	30	3.000.000	(10)	
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.750.000			0		
1	Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban kekerasan	6.750.000	22	0	0	(22)	Menyesuaikan kebutuhan korban
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			2.000.000		
1	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Anak Korban Kekerasan	10.000.000	40	22	2.000.000	(18)	Menyesuaikan kebutuhan korban
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	1.500.000			0		
1	Layanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya Bagi Anak Korban Kekerasan	1.500.000	33	0	0	(33)	Menyesuaikan kebutuhan korban
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :		30	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

-

Upaya

-

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Dikpol (reguler) 5 titik (KG);
2. Dikpol (aspirasi) 15 titik (KG);
3. PPEP tahap 4 (KG);
4. Piloting Implementasi PUG (KG);
5. Bimtek DWP (KG);
6. Fasilitasi Peningkatan Tim Ketahanan Keluarga Provinsi (TPK2D) (KG);
7. Advokasi Penguatan Kelembagaan Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten/Kota di 5 lokasi (PP);
8. Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan bagi Satgas PPK-PT di Wilayah Kab. Semarang (PP);
9. Penguatan Kapasitas Satgas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Kecamatan Berdaya via Zoom (PP);
10. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan ABH (dalam rangkaian HAN) (PA);
11. Advokasi dan sosialisasi PANDU CINTA bersama PKK (PA);
12. Fasilitasi Optimalisasi Kampung KB (Dalduk);
13. Fasilitasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Dalduk);
14. Bimtek UPPKA di Kab. Magelang (KS);
15. Penguatan Satyagraha via Zoom (KS);
16. Safari Pelayanan KB di Kab. Sukoharjo (KB);
17. Penggerakan program KB bersama mitra (KIE);

18.

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Memperhatikan pencapaian target-target indikator dalam RPJMD 2025-2029;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juli 2026, untuk dijadikan periksa.

Semarang, Kamis, 6 Agustus 2026

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Faisa Mukti Beptyani, S.Sos.M.Si

NIP. 197109192003122004